



Judul : Konflik Timur Tengah, komisi I ajak konsisten politik LN bebas aktif
Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Konflik Timur Tengah Komisi I Ajak Konsisten Politik LN Bebas Aktif

ANGGOTA Komisi I DPR Syahrul Aidi Maazat menekankan Indonesia harus tetap konsisten dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan. Sebab Indonesia sejak awal telah menegaskan diri sebagai negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.

"Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran," ujar Syahrul dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).

Syahrul mengatakan, Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi mengutuk penjajahan. Karena itu, dalam melihat konflik ini harus secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional.

Selain itu, ia mempertanyakan legitimasi serangan Amerika terhadap Iran. Sebab serangan tersebut tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini yang menjadi pertanyaan besar. Di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel," kata politikus PKS tersebut.

Syahrul memprediksi eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah

wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sehingga kondisi tersebut dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.

Karena itu, Iran tidak akan berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. "Ini menunjukkan konflik bisa melebar," kata dia mengingatkan.

Terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI), ia berharap, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memiliki prosedur tetap dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri. Terlebih, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) ketika terjadi konflik di suatu negara.

"WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika diperlukan evakuasi," ucap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.

Syahrul menilai, konflik tersebut harus menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kemandirian nasional. Seperti Iran yang mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, tapi tetap mampu mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri. "Iran bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia," katanya. ■ TIF